

BAB III

PENUTUP

3.1 Rekomendasi

Penulis memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola kepegawaian dalam lingkungan birokrasi daerah, terutama terkait aspek penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama pelaksanaan PKL, penulis diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam penerimaan administrasi ASN di seluruh Jawa Timur, melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, serta membantu dalam pengelolaan dokumen administratif yang berkaitan dengan surat kerja sama antar instansi. Keterlibatan aktif dalam kegiatan tersebut memberikan nilai tambah bagi penulis dalam memahami praktik nyata penerapan hukum administrasi negara, sekaligus memperkaya perspektif terhadap dinamika kerja birokrasi pemerintahan.

Penulis juga mencermati bahwa proses penanganan pelanggaran disiplin di lingkungan BKD Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur. Proses ini dimulai dari klarifikasi awal oleh atasan langsung, dilanjutkan dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pelimpahan kasus ke bidang terkait di BKD, pemeriksaan lanjutan, hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan penjatuhan sanksi. Setiap tahapan tersebut melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Inspektorat dan atasan langsung ASN. Seluruh proses dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas keadilan dalam

administrasi pemerintahan.

Pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan kontribusi nyata dalam membekali penulis untuk menghadapi dunia kerja, terutama di bidang hukum administrasi negara. Melalui kegiatan PKL ini, penulis memperoleh pemahaman baru tentang pentingnya koordinasi antarunit kerja dalam penegakan disiplin ASN, sekaligus melihat secara langsung bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dan ketelitian administratif diterapkan dalam praktik pembinaan kepegawaian di tingkat pemerintah daerah.

3.1.1 Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa perlu untuk membekali diri dengan pemahaman mengenai dasar-dasar hukum kepegawaian. Penguasaan terhadap regulasi yang relevan serta kemampuan menganalisis persoalan hukum menjadi aspek penting yang akan mendukung efektivitas dan kedalaman pengalaman selama menjalani magang.
2. Adanya keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat sangat dianjurkan. Mahasiswa tidak perlu ragu untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi dengan para pembimbing, karena sikap terbuka dan aktif akan memperluas kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta pengalaman yang bermakna di lapangan.

3.1.2 Bagi Fakultas Hukum

1. Perlu adanya penyesuaian kurikulum yang lebih menekankan pada metode pembelajaran berdasarkan kasus nyata, terutama dalam mata kuliah yang membahas hukum kepegawaian. Pendekatan ini bertujuan untuk

meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan hukum di dunia nyata secara langsung.

2. Sangat penting diberikan pembekalan atau materi yang mencakup pemahaman tentang regulasi di bidang kepegawaian. Pembekalan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dinamika kerja di lingkungan kelembagaan hukum secara lebih efektif dan terarah.

3.1.3 Bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

1. Pemberian kesempatan untuk melibatkan mahasiswa magang dalam kegiatan substantif, seperti telaah hukum, penyusunan BAP, atau asistensi dalam pemeriksaan ASN. Hal ini akan memberikan pengalaman yang lebih berkesan sekaligus memperkaya proses belajar mahasiswa di lapangan.
2. Perlu adanya sesi orientasi yang menjelaskan struktur kelembagaan, alur kerja, serta dasar hukum yang sering digunakan dalam proses kepegawaian dan pembinaan ASN. Ini memberi mahasiswa landasan awal sebelum terjun langsung ke aktivitas unit kerja.
3. Pemberian masukan dan evaluasi berkala dari mentor atau pembimbing lapangan sangat bermanfaat untuk pengembangan profesional mahasiswa. Sesi refleksi informal juga dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kesan, tantangan, dan pelajaran yang diperoleh selama PKL.